



POLICY BRIEF

BERSAMA-SAMA MEMBANGUN PAPUA DAMAI

TIM PERUMUS:

Dr. Adriana Elisabeth, MSoc.Sc (Koordinator)

Pater Dr. Neles Tebay, Pr

Dr. Ir. Agus Sumule

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, MPA

Cahyo Pamungkas, SE., M.Si

Latifah Anum Siregar, SH

Drs. Septer Manufandu

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI)

bekerja sama dengan Jaringan Damai Papua (JDP)

Jakarta, 2015

POLICY BRIEF BERSAMA-SAMA MEMBANGUN PAPUA DAMAI

© P2Politik LIPI, 2015

ISBN: 978-979-3384-73-3

TIM PERUMUS:

Dr. Adriana Elisabeth, MSoc.Sc (Koordinator)

Pater Dr. Neles Tebay, Pr

Dr. Ir. Agus Sumule

Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, MPA

Cahyo Pamungkas, SE., M.Si

Latifah Anum Siregar, SH

Drs. Septer Manufandu

Desain cetak: Prayogo



Diterbitkan oleh:

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik - LIPI)

Gedung Widya Graha LIPI, Lt. XI

Jl. Jend. Gatot Subroto KAV-10, Jakarta 12710 - INDONESIA

Tlp. / fax : 021 - 520 7118 | Website: www.politik.lipi.go.id

Twitter: @PolitikLIPI

BERSAMA-SAMA MEMBANGUN PAPUA DAMAI

Policy brief ini diajukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua (JDP) sebagai rekomendasi mengenai pentingnya pendekatan dialog bagi penyelesaian konflik Papua secara damai.¹ Rekomendasi ini didasarkan pada hasil diskusi empat pertemuan eksploratif di Badung (Provinsi Bali), Manado (Prov. Sulawesi Utara), Lombok (Prov. Nusa Tenggara Barat), dan Yogyakarta (Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta) yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat sipil dan adat di Papua. Rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden RI untuk menyelesaikan Papua secara demokratis dan bermartabat.

1 *Policy brief* sudah diserahkan kepada Presiden Terpilih, Joko Widodo pada tanggal 16 September 2014 dalam acara Kuliah Umum “Menyambut Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Nasional”, di Auditorium Lantai 2, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

Pendekatan dialog dalam konteks Papua adalah bentuk revolusi mental, yang menghindari cara-cara represif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, serta untuk mendukung peran dan posisi internasional Indonesia. Membangun

Policy brief ini dibuat berdasarkan hasil diskusi empat pertemuan eksploratif di Badung, Manado, Lombok, dan Yogyakarta.

Papua Damai membutuhkan rasa saling percaya dan saling menghormati di antara semua pemangku, dan hal ini dapat terbentuk melalui

dialog yang inklusif, partisipatif, dan komprehensif.

KONDISI TERKINI

Sejak 1 Mei 1963, hubungan antara rakyat Papua dengan Pemerintah terus mengalami dinamika. Menurut buku *Papua Road Map* (2008)², ada empat persoalan mendasar yang menjadi penghambat hubungan Jakarta dan Papua: 1) masih adanya perbedaan pemahaman terhadap

2 Lihat selengkapnya dalam *Papua Road Map* (Widjojo dkk, 2008), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Dialog adalah pilihan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai.

sejarah integrasi dan status politik Papua, 2) masih terjadinya kekerasan politik dan pelanggaran HAM di Papua, 3) pembangunan di Papua yang belum sepenuhnya berhasil, 4) masih terjadinya marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua.

Belum terselesaikannya empat persoalan tersebut mengakibatkan tingkat kepercayaan antara Pemerintah dan orang Papua terus memburuk.

Untuk menyelesaikan persoalan Papua, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, yang diperluas menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Sejalan dengan Otsus Papua, Pemerintah Pusat menjalankan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, pemekaran kabupaten/kota. Pemekaran daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik. Pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena keterbatasan infrastruktur dan kapasitas birokrat, serta sasaran-sasaran pembangunan yang tidak jelas di Papua.

Kedua, peningkatan alokasi anggaran pembangunan untuk Papua

diperkirakan berjumlah sekitar 45 triliun rupiah sejak 2002 (Dana Otsus, DAU, dan DAK), namun jumlah ini belum bisa mencapai sasaran pembangunan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat Papua.

Ketiga, pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk memperkuat koordinasi pembangunan di Papua tidak bekerja secara optimal. Program *quick wins* yang ditetapkan oleh unit tidak efektif karena: (1) perbedaan pendekatan antara UP4B dengan Kementerian Lembaga (K/L) terkait. Capaian koordinasi yang cukup baik terdapat pada sektor pendidikan. Namun di bidang politik, keamanan, hukum, HAM dan kebudayaan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2011 belum sepenuhnya dilaksanakan. Akibatnya, aksi kekerasan masih terjadi di Papua bukan hanya dilakukan oleh gerakan pro-merdeka, tetapi juga oleh kelompok sipil/kriminal bersenjata. (2) menurut sebagian masyarakat Papua, UP4B belum banyak melibatkan partisipasi orang Papua.

Keempat, penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Papua (RUU Otsus Plus) yang sedang disusun oleh Pemerintah Pusat atas usul dari Pemerintah Provinsi Papua masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan Pemerintah dan orang Papua.

RUMUSAN PERMASALAHAN

Cara pandang yang berbeda antara Papua dan Jakarta membuat seolah-olah posisi para pihak saling berhadapan. Untuk mengurangi kesenjangan cara pandang ini, maka dialog perlu dibangun sebagai pilihan pendekatan untuk menyelesaikan masalah Papua secara damai.

Dialog juga bermakna komunikasi konstruktif yang bersifat inklusif dan partisipatif untuk merumuskan masalah dan menemukan solusi secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil dari empat kali pertemuan eksploratif yang sudah disebutkan pada paragraf awal, maka permasalahan di Papua dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. MASALAH POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Pertama, konflik vertikal mencakup stigma separatis, pelarangan penggunaan simbol-simbol daerah, kekerasan yang dilakukan oleh TNI/Polri dan kelompok sipil bersenjata, serta pertentangan nasionalisme Indonesia *versus* etno-nasionalisme Papua. *Kedua*, kekerasan politik dalam pemilihan kepala daerah, pemekaran dan korupsi. *Ketiga*, kebijakan pemerintah yang inkonsisten dengan implementasinya, kurang memperhatikan nilai-nilai lokal, dan tumpang tindih. *Keempat*, kendala dalam penerapan *good governance*.

Dialog juga bermakna komunikasi konstruktif yang bersifat inklusif dan partisipatif untuk menemukan solusi secara bersama-sama.

Kelima, kebijakan keamanan masih berorientasi pada *state security* dan belum pada *human security*.

2. MASALAH SOSIAL EKONOMI

Pertama, disharmoni penyelenggaraan ekonomi modern dan tradisional, serta hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam yang tidak dilindungi. *Kedua*, terbatas dan tidak meratanya tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, serta belum terakomodirnya nilai-nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan. *Ketiga*, terbatas dan tidak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, terbatasnya sarana prasarana kesehatan, rendahnya gizi masyarakat, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, tingginya angka HIV, TB dan malaria, serta diskriminasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan.

3. MASALAH SOSIAL BUDAYA

Pertama, terabaikannya hak-hak dasar sosial budaya orang asli Papua.

Urgensi pendekatan dialogis adalah untuk membangun saling percaya (*trust building*) dan menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) atas proses pembangunan dan penyelesaian persoalan di Papua.

Kedua, perusakan dan penghancuran tempat-tempat sakral dan bangunan adat. *Ketiga*, stigma dan diskriminasi terhadap orang Papua. *Keempat*, kurangnya pengakuan Pemerintah terhadap sistem dan struktur pemerintahan adat. *Kelima*, maraknya perampasan tanah ulayat masyarakat adat secara sistematis atas nama pembangunan. *Keenam*, pemaksaan keyakinan antaragama dan di dalam agama.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Konflik di Papua merupakan konflik kekerasan terlama di Indonesia. Ketidakberhasilan dalam menyelesaikan masalah Papua secara tuntas memacu kita untuk menyusun strategi baru, yakni merumuskan kebijakan yang simultan, komprehensif, dan dialogis. Urgensi pendekatan dialogis adalah untuk membangun rasa saling percaya (*trust building*) dan menumbuhkan rasa

memiliki (*ownership*) terhadap proses pembangunan dan penyelesaian persoalan di Papua. Dialog juga akan memberikan legitimasi yang kuat bagi Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.

Para pemangku kepentingan di Indonesia disarankan untuk melanjutkan pertemuan-pertemuan secara jujur dan terbuka. Secara bersama-sama, Pemerintah dan masyarakat Papua perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi seluruh akar permasalahan di Papua.
- b) Menyelesaikan beberapa **isu prioritas**:
 - Percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ekonomi rakyat, dan aksi afirmasi.
 - Penghapusan stigma separatis terhadap orang asli Papua dan stigma penjajah terhadap Pemerintah.
 - Amnesti untuk semua tahanan/narapidana politik (tapol/napol) sebagai tanda itikad baik dari pemerintah.

- Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh anggota TNI/Polri maupun kelompok sipil bersenjata.
- Moratorium pemekaran daerah di Papua.
- Meninjau kembali kebijakan pembatasan akses bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi internasional untuk masuk ke Papua.
- Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di seluruh Papua.
- Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintahan daerah.
- Perbaikan dan pemerataan sektor pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu-ibu hamil di daerah-daerah terpencil di Papua.

Dialog akan memberikan legitimasi bagi Pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai.

- Perbaikan dan pemerataan sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar di seluruh Papua.
- Pengakuan terhadap hutan adat sebagai milik rakyat di tanah Papua.

Jakarta, 3 September 2014

Tim Perumus

PUSAT PENELITIAN POLITIK (P2Politik) LIPI



Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) adalah sebuah pusat penelitian di bawah Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK LIPI). P2Politik memiliki tiga kelompok penelitian yang meliputi: kajian politik nasional, politik internasional, dan politik lokal.

P2Politik secara aktif terlibat dalam kegiatan penelitian dan aktivitas ilmiah lainnya, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan fungsinya, P2Politik berkomitmen untuk senantiasa berkontribusi pada pembangunan politik nasional sebagaimana pengembangan pengetahuan tentang isu regional dan internasional.

Sebagai institusi pemerintah, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh P2Politik mencakup kajian ilmiah dan advokasi kebijakan serta juga mendorong pengembangan ilmu sosial terkait konsep dan teori baru dalam ilmu pengetahuan politik, politik perbandingan serta kajian politik kontemporer. ●



JARINGAN DAMAI PAPUA (JDP) adalah kelompok fasilitator terlatih yang menghimpun sejumlah aktivis masyarakat sipil dari lingkungan dosen, peneliti, mahasiswa, LSM, organisasi keagamaan, organisasi berbasis etnis/suku/adat dan kelompok strategis lainnya untuk bekerja sama secara sukarela menghubungkan berbagai pihak yang bertikai dan secara umum membantu masyarakat Papua dan Pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan Dialog Jakarta-Papua demi Perdamaian di Tanah Papua. ●